

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Pemerintah desa merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan publik yang dibentuk secara formal untuk menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Dalam entitas ekonomi, organisasi sektor publik memiliki suatu keunikan. Dikatakan unik karena dalam organisasi sektor publik didalamnya mempunyai suatu sumber daya ekonomi yang begitu besar, bisa melakukan suatu transaksi keuangan dan transaksi ekonomi yang dikelola tetapi tidak berorientasi pada laba atau keuntungan (Antara dan Rini, 2017).

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang telah diatur dalam UUD 1945. Indonesia sudah mulai menerapkan otonomi daerah pada tahun 2000 sejak ditetapkannya Undang-Undang No 22 tentang pemerintahan daerah dan No 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri dalam negeri Republik Indonesia, 2013). Dengan otonomi desa yang dianut Indonesia saat ini juga memberikan kesempatan penuh kepada pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah untuk mengelola sumber daya keuangannya untuk membangun desa serta mengelola secara mandiri potensi daerahnya.

Reformasi desa yang muncul sejak pengesahan Undang-Undang Desa tahun 2014 menciptakan keterbukaan dan sistem politik menjadi fleksibel beserta otonomi kelembagaan yang dapat mendukung akselerasi dalam pembangunan desa. Namun faktanya banyak desa yang belum mampu menggunakan peluang itu untuk meningkatkan kinerja pemerintah desanya. Salah satu faktor penting untuk meraih kinerja organisasional instansi pemerintah ialah pencapaian kinerja manajerial yang baik. Kinerja manajerial menggambarkan tentang kinerja para anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti: perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi (Sofyani et al., 2020). Kinerja manajerial bisa dikatakan maksimal jika seorang manajer mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik, sehingga organisasi bisa mencapai sasaran dan tujuan (Nasir dan Oktari, 2011).

Menariknya dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk desa yang berasal dari pusat dilakukan dengan

mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan, yang berarti pemerintah pusat bertanggungjawab atas pendanaan terhadap desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Indonesia pertama kali mengucurkan dana desa pada tahun 2015. Dana Desa adalah dana bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana desa yang diberikan setiap tahun juga semakin meningkat, sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap terlaksananya desentralisasi di Indonesia.

Kunci keberhasilan kinerja manajerial dalam pemerintah desa dapat dilihat dari kesuksesan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik otonom dituntut supaya kinerjanya bagus serta orientasi utama adalah pemenuhan kepentingan rakyat dan tanggap dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 sebesar Rp 325.602.817.000,00 pada tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sama yaitu Rp 369.061.708.000,00 dan pada tahun 2021 penerimaan sebesar Rp 663.993.225.000,00 (Kemenkeu.go.id). Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo No. 11 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dana desa, besarnya dana desa Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 mencapai Rp 346.454.872.000,00 dengan

penerimaan yang paling tinggi yaitu Desa Brunosari, Kecamatan Bruno senilai Rp 1.239.809.000,00 dan penerimaan yang paling rendah senilai Rp 549.270.000,00 ialah Desa Kembangkuning, Kecamatan Ngombol. Empat variabel dalam penentuan besarnya dana desa yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah desa 10 persen, angka kemiskinan 40 persen, serta indeks kesulitan geografis desa 40 persen (Ansori, 2022). Anggaran dana desa yang begitu besar diharapkan dapat dikelola dengan benar oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan Sofyani et al (2020) menunjukkan enam tahun sejak dijalankannya otonomi desa, kinerja pemerintah desa di Indonesia dikatakan masih belum memuaskan, penyebabnya yaitu kinerja manajerial pemerintah desa tidak optimal dilihat dengan maraknya kasus penyimpangan penggunaan anggaran dan rendahnya penyerapan anggaran diakibatkan oleh lemahnya tata kelola di pemerintah desa. Pemerintah pusat juga memberikan tambahan pendapatan desa melalui UU Desa baru yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja manajerial pemerintah desa. Penyerapan anggaran yang rendah pada saat awal tahun merupakan permasalahan paling sering terjadi dalam anggaran pemerintah, hal ini menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak merata (Suwarni, 2017). Anggaran merupakan suatu pernyataan tentang estimasi kinerja pemerintah yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu berupa ukuran finansial dan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Penyerapan anggaran dapat dijadikan

indikator keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

Penyerapan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini tentang keberhasilan perangkat desa dalam merealisasikan anggaran dana desa sesuai program yang ditetapkan dalam APBDes. Penyerapan anggaran yang rendah menjadi masalah paling banyak terjadi bahkan dapat dikatakan masalah klasik di Indonesia, karena terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Tabel berikut merupakan realisasi anggaran belanja dan pendapatan desa (APBDes) Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi.

Tabel 1.1 Laporan APBDes Desa Watukuro, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo

Jenis APBDes	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	Rp 1.022.119.800	Rp 923.414.688	90,34
Belanja	Rp 1.038.487.615	Rp 919.668.135	88,56
Pembiayaan	Rp 16.367.815	Rp 16.367.815	100

Sumber Data: Laporan Realisasi APBDes Desa Watukuro Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Watukuro tahun 2020, terdapat realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target anggaran antara lain: realisasi pendapatan sebesar 90,34% dan realisasi belanja sebesar 88,56 %. Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja manajerial dari instansi. Adanya masalah tersebut mencerminkan bahwa kinerja aparat

dalam mengelola anggaran perlu ditingkatkan. Evaluasi kinerja perlu dilakukan pada pemerintah desa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerjanya. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap kinerja, harapannya dapat membantu pemerintah desa untuk lebih berkembang serta dapat digunakan untuk menyusun rencana agar dapat menyiapkan antisipasi untuk kejadian serupa kedepannya.

Pemerintah desa saat ini mengemban tugas yang semakin konkrit, selain menguatkan aspek partisipasi masyarakat dan lembaga, aparat juga dituntut baik dalam tugas administrasi pemerintahan (Harahap, 2019). Dalam melaksanakan tugas pemerintah desa menduduki posisi penting, maka harus lebih meningkatkan efektif dan efisiensi seperti kapasitas sumber daya manusia. Kemampuan daerah tentang kemandiriannya dalam mengelola sumber daya keuangan dapat dijadikan cerminan otonomi daerah tersebut berhasil mandiri dengan berorientasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang didalamnya terdapat perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan anggaran yang matang sehingga tujuan dan sasaran tercapai (Tahar dan Kuncahyo, 2020). Kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dari kegiatan manajerial yang dihasilkan oleh seseorang yang didalamnya terdapat perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (*staffing*), negosiasi, dan representasi (Mayarani et al., 2021). Komitmen terhadap organisasi dapat dilihat dari semangat yang tinggi untuk ikut serta dalam

suatu bagian dari organisasi, jika komitmen organisasinya tinggi akan memberikan dampak maksimal terhadap kinerja pegawai tersebut.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

تُفْلِحُونَ لَأَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلِ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةُ فَضِيَّتِ فَإِذَا

Artinya: “Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Makna dari ayat diatas adalah seorang muslim yang tujuan berkerja atau berbisnis mencari rezeki yang halal, berkah dan melimpah semata-mata karena keridhaan Allah SWT. Seseorang yang bekerja dengan berlandaskan keridhaan dan keutamaan kepada Allah, maka dapat tercipta kinerja yang baik.

Kinerja manajerial dalam penyelenggara pemerintah desa adalah gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah desa yang mencerminkan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari aparaturnya pemerintah desa tersebut (Widasari dan Putri, 2018). Pemerintah desa yaitu kepala desa serta perangkatnya yang terdiri dari sekretaris desa dan pelaksana kewilayahan. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian terhadap kinerja penting dilakukan karena nantinya dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dalam suatu perusahaan.

Pengukuran kinerja mempengaruhi kinerja manajerial organisasi karena informasi yang dihasilkan dapat memudahkan manajer dalam mengawasi jalannya organisasi dan membantu pegawai yang membutuhkan bantuan (Marpaung et al., 2022). Untuk itu pengukuran kinerja perlu dilakukan karena hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan guna mencapai tujuan organisasi sektor publik yang lebih optimal.

Kinerja manajerial merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja mengelola dan mengatur anggotanya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Budaya organisasi dan kualitas sistem informasi akuntansi termasuk faktor penting untuk mencapai kinerja manajerial. Budaya organisasi yang ada dan dijadikan pedoman dapat memotivasi pekerja untuk berkomitmen kepada seperangkat keyakinan, nilai inti, dan asumsi yang sama sehingga terciptalah sumber daya manusia yang kompeten termasuk dalam mengoperasikan sistem teknologi. Efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan budaya organisasi menghasilkan eksistensi perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain, yang bisa dilihat dari kemahiran serta kesesuaian pemakai saat mengidentifikasi data, akses data, dan interpretasi data karena keduanya berkaitan erat dalam peningkatan kinerja organisasi (Putra et al., 2021). Sistem informasi akuntansi yang baik menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas tidak luput dari dukungan pimpinan (Thoa dan Nhi, 2022). Munculnya sistem informasi akuntansi sebagai akibat dari globalisasi yang membuat pencatatan akuntansi berkembang menjadi berbasis komputer bukan manual lagi karena lingkungan ekonomi di

perusahaan saat ini dituntut agar mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang inovatif dan relevan. Indriani (2018) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat mempermudah penyusunan sistem informasi akuntansi yang tepat, kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sumber daya manusia yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi berdampak terhadap kualitas sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif sehingga aktivitas berjalan lancar yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Salah satu teori yang berkaitan dengan kinerja manajerial yaitu teori *stewardship*. Teori ini melatarbelakangi pada kondisi manajer yang tidak hanya termotivasi dalam mencapai tujuan individu, tetapi juga bertujuan untuk tujuan organisasinya. Dalam suatu kinerja pemerintah desa, pemerintah bertindak sebagai steward dalam teori *stewardship* yang memiliki kewajiban untuk memberi informasi pada pengguna informasi keuangan pemerintah supaya transparansi dalam laporan keuangan dapat tercipta (Ikriyati dan Aprilia, 2019). Teori ini bisa diterapkan untuk memotivasi diri baik dari aparatur desa maupun masyarakat agar bisa memberikan tanggungjawab bersama untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2011) mengungkapkan bahwa tingkah laku seseorang yang didasarkan pada niat dan pertimbangan-pertimbangan tertentu termasuk perilaku dalam meningkatkan kinerja. Inti dari *Theory of planned Behavior* yaitu niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Venkatesh et al (2003) meyakini

bahwa sikap pegawai mau menggunakan sistem teknologi informasi akan mampu meningkatkan kinerja individu atau organisasi karena penggunaannya akan mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pada penelitian yang dilakukan Ariska dan Andirfa (2019) mengemukakan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Widasari dan Dwija Putri (2018) mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa, semakin baik budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa. Hasil penelitian Al-Delawi and Ramo (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berhubungan positif dengan kinerja manajemen. Dengan penemuan ini memberikan pedoman untuk para pembuat kebijakan bahwa mereka juga harus fokus pada sistem informasi akuntansi karena bisa meningkatkan kinerja organisasi. Rasyid and Yeop (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap manajemen pengetahuan dan kinerja manajerial departemen pemerintah di Dubai. Ferdian dan Devita (2020) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat meliputi kesadaran diri, keagresifan, performa, kepribadian, dan orientasi tim dari para pegawai tidak mempengaruhi kinerja. Dalam penelitian Girsang (2019) berdasarkan hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada RS Putri Hijau. Triseptya et al (2017) menyatakan bahwa variabel budaya organisasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, karena budaya organisasi yang rendah maka tingkat kinerja manajerial akan menurun dan sebaliknya.

Sunarka dan Bakhtiar (2019) mengemukakan bahwa budaya organisasi dan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2019) menemukan bahwa budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja manajerial, karakteristik sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Temuan dari data empiris yang dilakukan oleh A Ali et al (2016) menunjukkan bahwa organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dengan sistem informasi yang berkualitas. Grande et al (2011) menemukan adanya hubungan positif pada usaha mikro yang menggunakan sistem informasi akuntansi untuk manajemen fiskal dan bank terhadap ukuran kinerja yang lebih baik. Dalam penelitian ini juga terdapat *gap* penelitian yang dilakukan oleh Hilendri et al. (2018) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak dapat memediasi pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Penyebabnya ialah pemahaman karyawan dalam organisasi tentang aplikasi *software* akuntansi tidak baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Survei Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Purworejo)”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Widasari dan Dwija Putri (2018), Ariska dan

Andirfa (2019), serta Agustin (2019) menemukan bahwa budaya organisasi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Purworejo serta perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel intervening. Kualitas sistem informasi akuntansi dipilih sebagai variabel intervening karena dengan adanya sistem untuk sebuah organisasi adalah hal yang penting, kegunaan dan kemudahan teknologi informasi mempermudah pekerjaan pegawai dalam menghasilkan informasi akuntansi yang nantinya dapat digunakan manajer dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini populasi dan responden adalah organisasi pemerintah desa yang ada di lingkup Kabupaten Purworejo dengan responden yaitu kepala desa dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan bendahara desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)?
3. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial
2. Untuk menguji apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (SIA)
3. Untuk menguji apakah kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kinerja manajerial
4. Untuk menguji apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui kualitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai variabel intervening

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh budaya organisasi dan variabel intervening kualitas sistem informasi akuntansi (SIA), serta variabel dependen kinerja manajerial, serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan literatur dan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai kinerja manajerial pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah terutama pada desa.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam merencanakan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan melatih kemampuan berpikir kritis mengenai Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Desa dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Intervening

